

Judul : Stop Dulu Proyek Di Pulau Komodo
Tanggal : Sabtu, 14 Agustus 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ekosistem Terancam **Stop Dulu Proyek Di Pulau Komodo**

ANGGOTA Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta pemerintah menghentikan sementara pembangunan proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo. Hal itu menyusul adanya permintaan dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unesco.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata premium. Namun rencana ini ditolak oleh Unesco karena dikhawatirkan akan berdampak pada ekosistem di taman nasional yang ditetapkan sebagai salah satu warisan alam dunia ini.

"Pemerintah harus segera meninjau ulang semua rencana proyek infrastruktur karena berpotensi mengancam kelestarian di kawasan tersebut," tegas Johan, kemarin.

Johan mengingatkan, setiap pembangunan di Taman Nasional Komodo harus mengutamakan kelestarian ekosistem dan masyarakat sekitar. Mengingat, taman nasional ini memiliki luas 170.300 hektare dengan sumber daya manusia sekitar 120-an orang.

"Jadi perlu keseriusan pemerintah untuk lebih profesional mengelola potensi wisata Pulau Komodo agar menjadi pendapatan negara dengan tetap menjaga kelestarian Komodo sebagai

warisan dunia," tegas politisi PKS ini.

Johan juga mempertanyakan dasar penetapan Loh Buaya di Pulau Rinca dan Pulau Tatawa sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Nasional Komodo. Revisi zonasi terhadap dua pulau di sekitar taman nasional ini menyebabkan berkurangnya ruang publik dari 14,35 hektare menjadi 3,45 hektare sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17,5 hektare.

"Perubahan zonasi harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan *scientific based* demi masa depan ekosistem Pulau Komodo," harap dia.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Menurutnya, kelestarian habitat dan ekosistem sekitar harusnya menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan terkait kelangsungan Taman Nasional Komodo. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera menghentikan proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Pulau Komodo sesuai permintaan dari Unesco.

"Saya akan coba suarakan kepada eksekutif, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mudah-mudahan belum masuk ke Kementerian Investasi agar betul-betul rekomendasi Unesco itu mesti diikuti," tegas Mardani. ■ KAL